

**NAFKAH KELUARGA MENURUT MUHAMMAD QURAISH  
SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata I  
Pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam**

**Oleh :  
NURFAUZY AHMAD  
G100160050**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NAFKAH MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR  
AL-MISHBAH**

**PUBLIKASI ILMIAH**

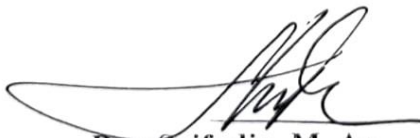
Oleh :



**NURFAUZY AHMAD**  
**G100160050**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Drs. Saifudin, M. Ag.**  
**NIDN. 0625055912**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**NAFKAH KELUARGA MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB  
DALAM TAFSIR AL-MISHBAH**

**OLEH  
NURFAUZY AHMAD  
G100160050**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada Jum'at, 12 November 2021**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

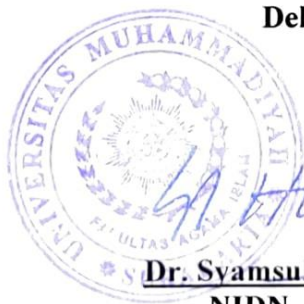
1. **Drs. Saifudin, M. Ag.**  
**(Ketua Dewan Penguji)**
2. **Alfiyatul Azizah, Lc., M. Ud.**  
**(Anggota I)**
3. **Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag.**  
**(Anggota II)**

(.....)

(.....)

(.....)

**Dekan FAI,**



**Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag.**  
**NIDN. 06050 96402**


## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2021

Penulis



**NURFAUZY AHMAD**  
**G100160050**

## **NAFKAH KELUARGA MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH**

### **Abstrak**

Terlaksananya akad akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu dari hak dan kewajiban bagi suami adalah menafkahi keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut hendaknya dilaksanakan dengan baik agar jauh dari perceraian, karena nafkah ini merupakan salah satu faktor perceraian. Penelitian dengan judul “Nafkah Keluarga Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah”, memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pemaknaan nafkah keluarga menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari Kitab Tafsir Al-Mishbah, serta karya-karya yang berkaitan berupa jurnal, skripsi, artikel ilmiah, maupun buku yang spesifik pada pembahasan tentang nafkah. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang bersifat analitis.

Hasil dari penelitian ini, Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat mengenai nafkah keluarga yang dapat disimpulkan bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya, nafkah tidak hanya berupa uang, melainkan dapat berbentuk hal yang lain contohnya, tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan sebagainya. Hukum nafkah terhadap keluarga adalah wajib dikarenakan adanya akad antara suami istri yang melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Saking wajibnya nafkah ini bagi istri yang diceraikan dalam kondisi hamil secara *raj'iy* dan *ba'in*, suami wajib memberikan nafkah selama masa kehamilan sampai bersalin, dan apabila sang istri mau menyusukan anak tersebut maka sang suami wajib memberi kepada istri yang menyusukan itu imbalan. Dalam pemberian nafkah disesuaikan dengan keadaan, kondisi, serta kemampuan suami.

**Kata Kunci :** Nafkah Keluarga, Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah.

### **Abstract**

The implementation of the contract will give rise to rights and obligations between husband and wife. One of the rights and obligations of the husband is to provide for his family, namely his wife and children. This obligation should be carried out properly so that it is far from divorce, because this living is one of the factors of divorce. The research entitled "Family Support According to Muhammad Quraish Shihab in Tafsir Al-Mishbah", has the aim of understanding how the meaning of family income according to Muhammad Quraish Shihab in the Book of Tafsir Al-Mishbah.

This research is a library research. The data sources used are primary and secondary data from the Book of Tafsir Al-Mishbah, as well as related works in the form of journals, theses, scientific articles, and books that are specific to the discussion of livelihood. The data will be analyzed using a qualitative descriptive method that is analytical.

The results of this study are that Quraish Shihab interprets the verses regarding family living in his commentary book Al-Mishbah is that a husband must provide a living for his wife and children, a living is not only in the form of money, but can take the form of other things, for example, a place to live, food, education, and so on. The law of living for the family is obligatory because there is a contract between husband and wife that gives birth to rights and obligations between the two. Because of this obligation for the wife who is divorced while pregnant in a *raj'i*y and *ba'in* condition, the husband is obliged to provide a living during the pregnancy until delivery, and if the wife wants to breastfeed the child, the husband is obliged to give the wife who breastfeeds it in return. The provision of a living is adjusted to the circumstances, conditions, and abilities of the husband.

**Keywords :** Family Support, Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang mana mempunyai arti yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan di dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Bagi seseorang yang sudah menikah akan merasakan ikatan suci pernikahan yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat derajat manusia lebih tinggi dan mulia daripada makhluk lain. Bahkan sesungguhnya hubungan antara suami dan istri adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang. Tujuan lain diselenggarakannya pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah,

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm. 7.

mawaddah dan rahmah serta sebagai sarana untuk memelihara keturunan dari masa ke masa.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa terjadinya hubungan pernikahan akan melahirkan adanya akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika di antara keduanya bisa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terwujudnya ketenangan dan ketentraman dalam hubungan rumah tangga.

Salah satu kewajiban seorang suami adalah menjadi seorang pemimpin serta menjadi tulang punggung keluarga sebagai penjamin ekonomi keluarga. Dan sebagai kepala rumah tangga, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga, baik nafkah lahir maupun batin.

Nafkah itu sendiri diambil dari kata “الإنفق” yang memiliki arti mengeluarkan.<sup>3</sup> Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>4</sup> Dalam buku syaria’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal sandang, pangan dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita kaya.<sup>5</sup>

Apabila dalam pemberian nafkah itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh suami, yang di mana itu merupakan kewajiban seorang suami. Maka, tidak bisa dipungkiri akan terjadinya pertengkaran di antara keduanya yang dapat berakhir dalam perceraian, dan nafkah ini merupakan salah satu faktor yang dapat memicu perceraian.

---

<sup>2</sup> Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 40.

<sup>3</sup> Ali As’ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*, jilid 3 (Kudus : Menara Kudus, 1979), hlm. 197.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, jilid II, Cet. II (Jakarta : 1984/1985), hlm. 184.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, Cet. I (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

Seperti yang penulis kutip dari situs salah satu pengadilan agama yang ada di Indonesia, yaitu Pengadilan Agama Bojonegoro, dalam kurun waktu bulan Januari hingga November 2020 tercatat 2.790 perkara. Faktor utama pemicu perceraian dikarenakan faktor ekonomi dan sumber daya manusia atau rendahnya tingkat pendidikan pasangan suami istri. Dari data yang sama, dari 2.790 perkara didominasi oleh perkara cerai istri gugat suami atau cerai gugat sebanyak 1.906 perkara (68, 32 persen), sementara sisanya cerai talak sebanyak 884 perkara (31, 68 persen). Jika dibandingkan dengan data perceraian pada tahun 2019, cerai gugat mengalami kenaikan 34 perkara yang dimana pada tahun 2019 sebanyak 1.872 perkara dan di tahun 2020 sebanyak 1.906 perkara.<sup>6</sup>

Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode tahlilî karena ia memberikan perhatian sepenuhnya terhadap semua aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkannya yang bertujuan untuk menghasilkan makna yang benar sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian ia juga menggunakan dua corak dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yaitu bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi karena di samping ia menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits dan ayat dengan pendapat sahabat dan tabi'in ia juga menggunakan pemikiran akalinya dan ijtihadnya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ayat 233 yang menjelaskan mengenai kewajiban nafkah,

وَالْوَلَدُ لِلْإِثْمَانِ كَالْوَلَدِ لِلْإِثْمَانِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ رِزْقًا مِّنْهُ فَارْزُقْهُنَّ مِمَّا رَزَقَكَ اللَّهُ وَأَلْبَسْنَهُنَّ ۚ وَالْكُلُوفُ لِلْإِثْمَانِ ۖ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.”

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Bojonegoro, “Hingga November 2020 Kasus Perceraian di Bojonegoro Sebanyak 2.790 Perkara”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Hingga-November-2020-Kasus-Perceraian-di-Bojonegoro-Sebanyak-2790-Perkara> (diakses pada 08 Maret 2021, pukul 23.05 WIB).



Dalam Tafsir Al-Mishbah dikatakan bahwa kewajiban memberi nafkah bagi anak yang dilahirkan untuknya, yakni ayah. Dan tetap memberikan makan dan pakaian terhadap ibu dari anak yang disusukan itu walau telah diceraikannya secara ba'in, bukan raj'iy. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara raj'iy, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'rûf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti seorang suami berhak memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, bahkan nafkah utama yang diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Kewajiban memberi nafkah disesuaikan dengan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan kondisi serta standar hidup mereka. Begitu juga terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak yang terlantar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana makna

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol.1 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 503-505.

nafkah keluarga menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Mishbâh*. Kemudian tujuan penelitian ini yakni memberikan uraian mengenai makna nafkah keluarga menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsir nya Tafsir Al-Mishbah.

Setelah melakukan *research* tentang kepustakaan, peneliti menemukan beberapa referensi-referensi yang pembahasannya relevan dengan tema di atas, di antaranya adalah *Pertama*, Aji Gema Permana (UIN Sunan Kalijaga. 2016), dalam skripsinya yang berjudul, “Nafkah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”. Menyimpulkan bahwa nafkah secara bahasa memiliki arti pembelanjaan harta yang dimiliki, yang mencakup zakat mal dan sedekah mal, hampir selalu dan semestinya dalam jalan kebaikan, untuk setiap kebutuhan hidup. Di dalam Al-Qur’an terdapat 56 ayat nafkah yang tersebar dalam 25 surat : 11 surat di antaranya tergolong makkiyah dan 14 lainnya madaniyah. Terdapat sejumlah sebab turunnya ayat-ayat nafkah. Namun beberapa tidak memiliki sebab turun. Nafkah berasal atau bersumber dari rezeki milik Allah SWT. Penyaluran nafkah dalam Al-Qur’an antara lain : kedua orang tua, istri dan anak, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, perjuangan di jalan Allah SWT, pembelaan perang, istri yang diceraikan dalam masa hamil dan atau menyusui, termasuk objek zakat yang terdiri dari : fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang yang berada dalam perjalanan.<sup>8</sup>

*Kedua*, Imam Mustakim, (UIN Sunan Kalijaga. 2005), dalam skripsinya yang berjudul, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)”. Menyimpulkan bahwa dalam pandangan Quraish Shihab, agama Islam tidak merinci pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing. Sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan

---

<sup>8</sup> Aji Gema Permana, “*Nafkah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*”. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

tolong-menolong. Pemikiran Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan ada dua, salah satunya mengenai nafkah yang di mana nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami terhadap keluarganya sesuai kemampuannya.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi dan Ahmad Nurfadilah (IAIN Syekh Nurjati Cirebon.Vol. 4, No. 1, 2019), dalam jurnalnya yang berjudul, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”. Menyimpulkan bahwa, para ulama mazhab telah menyepakati bahwa kewajiban nafkah di dalam keluarga dibebankan kepada suami atas istrinya. Akan tetapi, apabila suami tidak mampu memberi nafkah yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa ada alasan yang jelas, maka hal ini menjadi hutang bagi suami kepada istri. Kecuali apabila istri sudah mengikhlaskannya. Kewajiban nafkah dalam rumah tangga sesungguhnya bukan suami yang diberi kewajiban untuk memberi nafkah melainkan siapa yang mampu, maka dia lah yang wajib. Sekalipun dia sebagai istri. Menurutnya sistem sosial yang terdapat di dalam Al-Qur’an tidak berlaku untuk selamanya, melainkan berubah sesuai dengan kondisi zaman yang dihadapi. Apabila persoalan lama diambil untuk menyelesaikan persoalan masa kini, yang didapat bukanlah kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan, melainkan akan menimbulkan ketimpangan.<sup>10</sup>

*Keempat*, Ibnu Rozali (UIN Raden Fatah Palembang. Volume 06, Nomor 02, 2017, hlm. 200). Dalam jurnal nya yang berjudul, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam”. Menyimpulkan bahwa memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali jika istri menolak (mengikhlaskan diri tidak dinafkahi suami) atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahnya. Selanjutnya, nafkah itu boleh ditentukan misalnya dengan makanan, lauk pauk, pakaian atau berupa barang-barang tertentu ataupun dengan sejumlah uang sebagai

---

<sup>9</sup> Imam Mustakim, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)*”. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>10</sup> Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi dan Ahmad Nurfadilah, “*Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*”, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 1, hal. 107-121, 2019.

ganti dari harga barang-barang yang diperlukan istri. Diberikannya pun boleh tahunan, bulanan, mingguan atau harian, dengan kelapangan suami.<sup>11</sup>

*Kelima*, Syamsul Bahri (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015)), dalam jurnalnya yang berjudul, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, menyimpulkan bahwa pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah : 233 dan juga al Hadits. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.<sup>12</sup>

Dari ke lima skripsi dan jurnal di atas letak perbedaan yang akan diteliti adalah terletak pada makna nafkah bagi keluarga, karena dalam penelitian ini menggunakan pemikiran Quraish Shihab dan menggunakan penafsirannya dalam kitab *Tafsir Al-Mishbâh*. Sedangkan dari ke lima penelitian di atas menggunakan perspektif para ahli lain.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai literatur perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah, ensiklopedi, biografi, dan lain- lain. Baik dari sumber data primer maupun sekunder.

---

<sup>11</sup> Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam”, *Intelektualita* Vol. 06, No. 02, hal. 189-202, 2017

<sup>12</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, No. 66, hal. 381-399, 2015.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa temuan-temuan yang sudah didapat. Deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan menuturkan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.<sup>13</sup> Metode deskriptif analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memaparkan penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan Nafkah dalam Kitab *Tafsir Al-Mishbâh*. Kemudian dilakukan analisis data untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban yang dibutuhkan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut bahasa kata nafkah diambil dari kata (انفق) dalam bahasa Arab yang berarti berkurang dan juga berarti (فنى و ذهب) yang artinya hilang atau pergi.<sup>14</sup> النفقة) al-Nafaqah mempunyai arti belanja, biaya atau pengeluaran.<sup>15</sup> Menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia seperti sandang, pangan dan papan.<sup>16</sup> Adapun nafkah menurut ulama fiqih adalah pengeluaran seseorang yang berupa kebutuhan pokok kepada yang wajib dinafkahinya, misalnya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hukum nafkah ini adalah wajib, semisal nafkah suami terhadap istri atau terhadap anaknya.<sup>17</sup>

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 3 mengenai pengertian nafkah, nafkah yakni mengeluarkan apa yang dimiliki

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 165

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449

<sup>16</sup> Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras "Fikih II"*, Cet. I (Makassar : Alauddin Press, 2010), hlm. 116.

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Alal Mazahibil al-Arba'ah*, Juz 4, Cet I (Mesir : Daar al-Afaq al-Arabiah, 2005), hlm. 424.

dengan tulus setiap saat dan secara berkesinambungan yang wajib maupun sunnah, untuk kepentingan pribadi, keluarga dan siapapun yang berhak mendapatkannya.<sup>18</sup>

Hukum nafkah ini adalah wajib bagi seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anak-anaknya, atau tuan terhadap budaknya.<sup>19</sup> Nafkah tersebut diwajibkan atas suami disebabkan tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana seorang istri taat terhadap suami, selalu membersamai, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.<sup>20</sup>

Sebab Terjadinya Nafkah Al-Imam Taqiuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar menjelaskan ada tiga sebab yang menimbulkan wajibnya nafkah, yaitu: adanya hubungan kerabat dan keluarga, adanya hubungan pemilikan tuan dengan budaknya, dan adanya hubungan perkawinan.<sup>21</sup> Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi dalam bukunya yang berjudul Fiqih Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, dikatakan bahwa diwajibkannya suami memberikan nafkah bergantung pada terpenuhinya tiga hal, *pertama*, akad nikah antara suami dan istri telah berlangsung secara sah, *kedua*, istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga, *ketiga*, tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.<sup>22</sup>

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, misalnya, akad nikah nya tidak berlangsung dengan sempurna sehingga dianggap tidak sah, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Kemudian, apabila si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta : Lentera Hati, 2004), hlm. 93.

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, juz IV (Mesir : Dar al-Hadits, 1969), hlm. 553.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Kuwait : Darul Bayan, 1971), hlm. 88.

<sup>21</sup> Al-Imam Taqiuddin, *Kifatayul Akhyaar* Juz III (Singapura : Sulaiman Mar'i, t.t.), hlm. 87.

<sup>22</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 138.

menolak untuk pindah ke rumah yang telah disediakan sang suami, maka tidak ada kewajiban atasnya nafkah.<sup>23</sup>

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah dari suami adalah istri, anak, orang tua dan kerabat baik yang dekat maupun yang jauh seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah [2] : 215.<sup>24</sup> Dalam hubungan perkawinan adalah istri, apabila telah sah dan sempurna suatu perkawinan. Maka sejak itu pula kedudukan laki-laki menjadi seorang suami dan perempuan menjadi seorang istri, dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang di mana nafkah merupakan salah satu hak istri. Dalam hal ini para ahli fiqih telah sepakat, bahwa nafkah itu wajib diberikan suami kepada istrinya yang merdeka, bukan hamb sahaya dan tidak membangkang atau *nusyuz*.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan mengenai hal ini, para ulama memperkirakan penentuan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri adalah bergantung pada status dan kondisi keuangan suami, secara *ma'ruf* dalam istilah Al-Qur'an, dan tidak bergantung kepada status istri, baik ia berasal dari keluarga kaya maupun miskin.<sup>26</sup> Pemenuhan kebutuhan istri seperti, makan, pakaian dan tempat tinggal harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan adat atau kebiasaan setempat, tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Bagaimanapun di antara keduanya, baik dari suami maupun istri sebaiknya mampu menyelesaikan persoalan mengenai kadar nafkah, demi keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Lihat Q.S. Al-Baqarah[2] : 215.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Budayat Al-Mujtahid III, Terj. Abdurrahman, MA dan A. Hariz Abdullah* (Semarang : As-Syifa', 1990), hlm. 463.

<sup>26</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 139.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 139

Dalam Surah An-Nisa [4] : 34, menjelaskan bahwa kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri disebabkan suami merupakan pemimpin bagi keluarga. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Akan tetapi keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan yang keistimewaannya lebih menunjang kepada pemberi rasa damai terhadap laki-laki dan mendidik serta membesarkan anak-anaknya.

Dalam ayat ini pemberian bentuk kata kerja masa lampau pada kata “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada istri telah menjadi sesuatu hal yang biasa bagi laki-laki yang sudah menjadi kenyataan umum dalam masyarakat dulu hingga kini. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga saat ini.

Secara psikologis, wanita tidak mau diketahui oleh suaminya jika ia membelanjai suaminya, sebaliknya laki-laki merasa malu bila ada yang mengetahui jika kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Atas dasar itulah Islam memberikan tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, yang di mana mewajibkan suami untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.

Dalam Surah Al-Baqarah [2] : 233, dijelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah bagi anak yang dilahirkan untuknya. Dan juga tetap memberikan makan dan pakaian terhadap ibu dari anak yang disusukan itu walau telah ditalaknya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu dari anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi nafkah merupakan atas dasar hubungan suami istri, sehingga apabila mereka menuntut imbalan itu dinilai wajar.

Hal ini menjadi kewajiban ayah karena anak itu membawa nama ayahnya dan nama ayah akan disandang untuknya. Kewajiban memberi nafkah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni sesuai dengan kesanggupan seorang ayah. Dan jangan sampai ayah mengurangi hak seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan



pakaian dan jangan sampai pula seorang ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah.

Dengan adanya tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapatkan jaminan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwanya dengan baik. Bahkan apabila sang ayah meninggal, jaminan itu tetap harus diperoleh oleh sang anak. Karena ada pewaris yakni sang anak dan warisan itu menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal. Warisan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyusuan dan ibu yang menyusunya. Ayat ini telah memberi jaminan hukum bagi kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.

Dalam Surah Ath-Thalaq [65] : 6, ayat ini mempertegas bahwa wanita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak yang bertujuan untuk memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian. Ayat ini mengandung perintah kepada para suami agar menempatkan istri di tempat yang baik, tentunya disesuaikan dengan kemampuan sang suami.

Apabila sang istri yang dicerai sedang hamil, baik secara *raj'iy* maupun *ba'in*, maka sang suami wajib memberikan nafkah sepanjang masa kehamilan hingga bersalin. Apabila istri menyusukan anak yang dilahirkannya itu, maka suami hendaknya memberikan imbalan dalam melaksanakan tugas penyusuan itu. Bermusyawarah dengan istri segala seuatunya termasuk soal imbalan tersebut dengan cara yang baik dan apabila sang ibu enggan menyusukan, maka boleh perempuan lain menyusukan anak itu baik melalui air susunya maupun susu buatan. Oleh karena itu jangan memaksakan ibunya dalam hal penyusuan, kecuali apabila sang anak tidak mau menyusu selain susu ibunya.

Selanjutnya dalam Surah Ath-Thalaq [65] : 7, dijelaskan bahwa apabila suami yang memiliki kelapangan rezeki hendaknya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya sehingga anak dan istrinya memiliki keluasan dan kelapangan dalam berbelanja. Jika penghasilan sang suami terbatas, maka hendaknya memberi nafkah atas apa yang telah Allah berikan padanya. Jangan memaksakan diri

dalam pemberian nafkah dan jangan sampai mencari rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah.

Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Bagi istri jangan menuntut terlalu banyak terhadap suami dan pertimbangkanlah keadaan sang suami atau bekas suami. Karena dalam pemberian nafkah tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Hal ini disesuaikan dengan adat setempat yang berlaku yang tentunya akan berbeda satu dengan yang lainnya.

Apabila suami tidak dapat memenuhi kebutuhan dan biaya hidup keluarganya, maka bagi istri yang tidak rela hidup dengan suaminya itu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara wajar dapat menuntut cerai. Akan tetapi hal ini masih menjadi bahan diskusi dan silang pendapat para ulama.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat mengenai nafkah keluarga yang dapat disimpulkan bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya, baik sukarela ataupun tidak itu tetap menjadi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga. Nafkah tidak hanya berupa uang, melainkan dapat berbentuk hal yang lain contohnya, tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang itu merupakan kebutuhan pokok.

Hukum nafkah terhadap keluarga adalah wajib dikarenakan adanya akad antara suami istri yang melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Saking wajibnya nafkah ini, bagi istri yang dicerai dalam kondisi hamil secara *raj'iy* dan *ba'in*, suami wajib memberikan nafkah selama masa kehamilan sampai bersalin, dan apabila sang istri mau menyusukan anak tersebut maka sang suami wajib memberi kepada istri yang menyusukan itu imbalan.

Selanjutnya apabila sang istri telah melahirkan atau telah memiliki bayi dicerai secara *ba'in* bukan *raj'iy*, kewajiban memberikan nafkah terhadap anak harus

dilaksanakan dan bagi si ibu yang menyusukan anak tersebut tetap diberikan makanan dan pakaian. Dan apabila si ibu tersebut dicerai secara *raj'iy*, maka pemberian nafkah tersebut atas dasar hubungan suami istri sehingga apabila mereka menuntut imbalan itu dinilai wajar.

Dalam pemberian nafkah disesuaikan dengan keadaan, kondisi, serta kemampuan suami. Karena tidak ada kadar tertentu untuk nafkah bagi keluarga. Hal ini kembali kepada kondisi serta adat yang berlaku dalam suatu masyarakat atau yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan '*urf*' yang tentu akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, serta dari waktu ke waktu yang lain.

Dari bahasan mengenai nafkah keluarga menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, selanjutnya dikemukakan saran-saran :

- a. Bagi masyarakat untuk tetap selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.
- b. Untuk pemerintah khususnya KEMENAG agar mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri.
- c. Bagi peneliti selanjutnya tema mengenai nafkah ini dapat dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. I. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aji G.P. 2016, Nafkah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) [Skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- As'ad, Ali. 1979. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3. Kudus : Menara Kudus.
- Azzam, Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta : AMZAH.
- Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 66. 381-399.

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1985. *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II. Jakarta : Departemen Agama.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5. Jakarta : Kencana Pernada Media Group.
- Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Mizan.
- Imam M. 2005. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah [Skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz IV. Mesir : Dar al-Hadits.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Nuroniayah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. 2019. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1. 107-121.
- Rozali, Ibnu. 2017. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam", *Intelektualita*, Vol. 06, No. 02. 189-202.
- Rushd, Ibnu. 1990. *Budayat Al-Mujtahid III*, Terj. Abdurrahman, MA & A. Hariz Abdullah. Semarang : As-Syifa'.
- Rusmana, Dadan. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqhus Sunnah*. Kuwait : Darul Bayan.
- Salim, Muin, dkk. 2017. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*. Yogyakarta : Pustaka Al-Zikra.
- Samin, Sabri, Nurmaya Aroeng. 2010. *Buku Daras "Fikih II"*, Cet. I. Makassar : Alauddin Press.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir Al-Mishbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol.1. Jakarta : Lentera Hati.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Taqiuddin. t.t. *Kifatayul Akhyaar*, Juz III. Singapura : Sulaiman Mar'i. Sumber Internet

Pengadilan Agama Bojonegoro. 2020. Hingga November 2020 Kasus Perceraian di Bojonegoro Sebanyak 2.790 Perkara. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Hingga-November-2020-Kasus-Perceraian-di-Bojonegoro-Sebanyak-2790-Perkara> (diakses pada 08 Maret 2021, pukul 23.05 WIB).